

**ANALISIS STAKEHOLDER EKOWISATA HUTAN PINUS  
DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANGKIT TEBAK,  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROVINSI LAMPUNG**

**Skripsi**

**Oleh**

**NATHASYA**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### ANALISIS STAKEHOLDER EKOWISATA HUTAN PINUS DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANGKIT TEBAK, KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROVINSI LAMPUNG

Oleh

NATHASYA

Hutan lindung memiliki fungsi yang sangat penting sebagai penyangga kehidupan, namun permasalahan hutan lindung Indonesia sudah memasuki kritis sehingga hutan lindung memerlukan pengelolaan secara bijaksana dan berkelanjutan. Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih banyak memiliki hutan, salah satunya adalah kawasan hutan lindung yang berada di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tangkit Tebak. Area KPH Tangkit Tebak memiliki beberapa potensi ekowisata berupa hutan pinus dengan luas 1,7 ha dikelola dengan izin hutan kemasyarakatan (HKm) pada tahun 2018. Ekowisata dapat berhasil dengan adanya *stakeholder*. Berdasarkan 2 penelitian sebelumnya dilokasi yang sama pada ekowisata hutan pinus Lampung Barat pada tahun 2019 dan 2020 memberikan informasi berbeda mengenai *stakeholder*. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi, menentukan peran kategori, dan hubungan antar *stakeholder*. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari - Februari 2022 dengan objek penelitian yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam ekowisata hutan pinus Kabupaten Lampung Barat. Penentuan sampel menggunakan teknik *snow-ball sampling* dan metode wawancara mendalam (*indepth interview*), kuisisioner, observasi di lapangan serta penelusuran dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam *stakeholder* dengan peran yang cukup optimal terbagi atas Gapoktan Srimulya II, Pekon Sukapura, Kelompok Pecinta Alam (KPA) *Green*, Himpunan Pemuda Peduli Hutan dan Lingkungan (HPPHL) sebagai *stakeholder* primer, KPH Tangkit Tebak sebagai *stakeholder* kunci, dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat sebagai *stakeholder* sekunder. Pembagian Kategori *stakeholder* sudah cukup seimbang digambarkan melalui matriks *stakeholder* dengan posisi *stakeholder* terjaring dalam kuadran *key players* dan *context setters*. Namun hubungan antar *stakeholder* masih kurang optimal sehingga diperlukan peningkatan hubungan salah satunya melalui penambahan intensitas pertemuan seluruh *stakeholder*.

Kata Kunci : peran, kategori, hubungan, pihak terkait, hutan lindung,  
wisata berkelanjutan

## ABSTRACT

### STAKEHOLDER ANALYSIS OF PINE FOREST ECOTOURISM IN THE UNIT MANAGEMENT OF THE TANGKIT TEBAK FOREST, LAMPUNG BARAT REGENCY, LAMPUNG PROVINCE

By

NATHASYA

Protected forests have an essential function as life support, but Indonesia's protected forest problems have entered a critical state so that protected forests require wise and sustainable management. Lampung is one of the provinces in Indonesia still has many forests, one of which is a protected forest area in the Tangkit Tebak Forest Management Unit (KPH). The KPH Tangkit Tebak area has several ecotourism potentials in the form of a 1.7 ha pine forest managed with a community forest permit (HKm) in 2018. Ecotourism can be successful with the presence of stakeholders. Based on two previous studies at the exact location in West Lampung pine forest ecotourism in 2019 and 2020 provided different information about stakeholders. This research aims to identify and role, determine categories, and determine the relationship between stakeholders. This research was conducted in January - February 2022 with the object of research, namely the parties involved in pine forest ecotourism in West Lampung Regency. Determination of the sample using the snowball sampling technique and the method of in-depth interviews, questionnaires, field observations and document searches. The results showed that there were six stakeholders with quite optimal roles, namely Gapoktan Srimulya II, Pekon Sukapura, KPA Green, HPPHL as primary stakeholders, KPH Tangkit Tebak as key stakeholders, and the Youth and Sports Office of West Lampung as secondary stakeholders. The division of stakeholder categories is reasonably balanced, depicted through the stakeholder matrix, with the stakeholder positions being netted in the key players and context setters quadrants. However, the relationship between stakeholders is still not optimal, so it is necessary to increase the relationship by increasing the intensity of all stakeholder meetings.

Keywords: roles, categories, relationships, related parties, protected forests, sustainable tourism.

**ANALISIS STAKEHOLDER EKOWISATA HUTAN PINUS  
DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANGKIT TEBAK,  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**NATHASYA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA KEHUTANAN**

**Pada**

**Jurusan Kehutanan  
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS STAKEHOLDER EKOWISATA  
HUTAN PINUS DI KESATUAN  
PENGELOLAAN HUTAN TANGKIT  
TEBAK, KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT, PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Nathasya**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1714151014**

Jurusan : **Kehutanan**

Fakultas : **Pertanian**



**MENYETUJUI,**

**1. Komisi Pembimbing**

**Yulia Rahma Fitriana, S.Hut., M.Sc., Ph.D.**  
NIP. 198307162005012001

**Rommy Qurniati, S.P., M.Si.**  
NIP. 197609122002122001

**MENGETAHUI**

**2. Ketua Jurusan Kehutanan**

**Dr. Indra Gumay Febriyano, S.Hut., M.Si.**  
NIP. 197402222003121001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

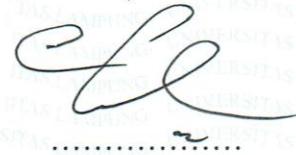
Ketua : **Yulia Rahma Fitriana, S.Hut., M.Sc., Ph.D.**



Sekretaris : **Rommy Qurniati, S.P., M.Si.**



Penguji : **Dr. Ir. Gunardi D. Winarno, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Pertanian



**Prof. Dr. Ir. Irvan Sukri Banuwa, M.Si.**  
NIP. 196110201986031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **7 Oktober 2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nathasya

NPM : 1714151014

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“ANALISIS STAKEHOLDER EKOWISATA HUTAN PINUS  
DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANGKIT TEBAK,  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROVINSI LAMPUNG”**

Adalah benar karya saya sendiri yang saya susun dengan mengikuti norma dan etika akademik yang berlaku. Selanjutnya, saya juga tidak keberatan apabila sebagian atau seluruh data pada skripsi ini digunakan dosen dan/atau program studi untuk kepentingan publikasi. Jika di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana maupun tuntutan hukum.

Bandar Lampung, 17 November 2022

Yang menyatakan



Nathasya

NPM. 1714151014

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, 02 Mei 1998 sebagai anak pertama dari dua bersaudara merupakan anak dari pasangan Bapak Jon Hernadi dan Nelly. Penulis menempuh pendidikan di SDN 01 Kupang Raya 2006-2011, SMPN 23 Bandar Lampung tahun 2011-2014, dan SMAN 10 Bandar Lampung tahun 2014-2017.

Tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Lampung sebagai Ketua Umum periode 2020. Di tahun yang sama penulis mengikuti pengabdian masyarakat di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dan bekerjasama dengan Telkomsel mengadakan Jaringan Tanggap bencana Mahasiswa Pecinta Alam (Jagat Mapala) se-Provinsi Lampung. Pada tahun 2019 penulis pernah menjadi Badan Pendidikan dan Latihan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Lampung.

Penulis pernah melaksanakan kegiatan Praktik Umum selama 40 hari pada bulan Juli-Agustus 2020 di Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Tangkit Tebak Provinsi Lampung. Selama 40 hari, penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Labuhan Permai, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji pada bulan Januari-Februari 2020. Penulis mempresentasikan prosiding pada Seminar Nasional Konservasi II pada tahun 2022 yang berjudul “Peran Stakeholder Ekowisata Berbasis Hutan Pinus, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung”.

*Bismillahirrahmanirrahim*

**“Allhamdulillah, Bukan karena hamba mampu tapi karena Allah SWT mengizinkan”**

**“Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku”  
- QS. Maryam : 4 -**

**“Kupersembahkan karya ini untuk Orang tuaku Tercinta”**

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis bisa menyusun skripsi yang berjudul “Analisis *Stakeholder* Ekowisata Hutan Pinus di Kesatuan Pengelolaan Hutan Tangkit Tebak, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung”. Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir yang sangat besar pengaruhnya terhadap umat manusia.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang begitu berarti bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kebaikan yang diberikan untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut diberikan oleh penulis kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si., selaku Ketua Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
3. Ibu Yulia Rahma Fitriana, S.Hut., M. Sc., Ph. D., selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, dukungan, motivasi serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Rommy Qurniati, S.P., M.Si., selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, dukungan, motivasi serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Ir. Gunardi D. Winarno., M. Si., sebagai dosen penguji yang telah memberikan ilmu, dukungan, kritik, saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Melya Riniarti, S.P., M. Si., selaku dosen Pembimbing Akademik

- yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staff dan karyawan Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung atas ilmu, pengalaman dan kerjasama yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan administrasi.
  8. Bapak dan Ibu staff administrasi Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
  9. Bapak Luluk Setyoko, S.Hut, M.Eng., selaku Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Tangkit Tebak yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tangkit Tebak.
  10. Staf dan Penyuluh KPH Tangkit Tebak yang tak dapat disebutkan satu persatu namanya namun telah membantu penulis dalam perjalanan maupun pengambilan data di lokasi ekowisata hutan pinus Lampung Barat Provinsi Lampung.
  11. Seluruh kepala instansi *stakeholder* terkait ekowisata hutan pinus Lampung Barat Provinsi Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu, bekerjasama, serta memberikan informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
  12. Ayahanda dan ibunda tercinta yang begitu berarti dengan selalu, memberikan do'a, inspirasi, dukungan, dan motivasi kepada penulis dalam segala hal di kehidupan penulis.
  13. Adek tersayang penulis yang begitu setia memberikan dukungan, menemani dan selalu memberikan do'a kepada penulis dalam segala hal di kehidupan penulis.
  14. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a dan dukungan dan motivasi kepada penulis.
  15. Sahabat-sahabat penulis yang memberikan do'a, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam banyak hal maupun skripsi.
  16. Teman-teman kehutanan RAPTORS'17 dan keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Lampung yang telah memberikan pengalaman serta kesan selama proses perkuliahan.
  17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi maupun dalam perkuliahan.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun baik di kehidupan maupun dalam penyelesaian skripsi ini mendapat kan balasan yang baik dan berlipat dari Allah SWT.

Penulis menyadari, sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan lupa bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi bacaan bagi seluruh pihak terkait ekowisata hutan pinus Lampung Barat Provinsi Lampung dan khalayak umum.

Bandar Lampung, 17 November 2022

Nathasya

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
1.5. Kerangka Pemikiran.....	4
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Gambaran Umum Wilayah Kesatuan Hutan (KPH) Tangkit Tebak .....	7
2.2. Ekowisata Hutan Pinus .....	8
2.3. Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) .....	8
2.4. Hutan Kemasyarakatan (HKm).....	11
2.5. Jasa Lingkungan.....	12
2.6. Ekowisata.....	13
2.7. <i>Stakeholder</i> .....	17
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	19
3.2. Alat dan Objek Penelitian .....	20
3.3. Jenis Data .....	20
3.4. Penentuan Sampel.....	20
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.6. Analisis Data.....	21
3.6.1. Identifikasi <i>Stakeholder</i> .....	22
3.6.2. Kategori <i>Stakeholder</i> .....	23
3.6.3. Hubungan <i>Stakeholder</i> .....	24
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
4.1. Sejarah Hutan Pinus Sumberjaya Lampung Barat.....	27
4.2. Daya Tarik dan Fasilitas Ekowisata Hutan Pinus .....	31
4.3. Identifikasi <i>Stakeholder</i> Ekowisata Hutan Pinus.....	33

4.4. Klasifikasi Kategori Stakeholder Ekowisata Hutan Pinus.....	39
4.5. Hubungan antar Stakeholder Ekowisata Hutan Pinus .....	44
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>48</b>
5.1. Simpulan .....	48
5.2. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Teknik Pengumpulan Data Menurut Tujuan.....	21
2. Daftar <i>Stakeholder</i> Kunci .....	22
3. Peran <i>Stakeholder</i> .....	23
4. Kriteria Tingkat Kepentingan dan Pengaruh .....	23
5. Indikator Komunikasi, Koordinasi, Kerjasama .....	25
6. Hubungan antar <i>Stakeholder</i> dalam Komunikasi .....	26
7. Hubungan antar <i>Stakeholder</i> dalam Koordinasi .....	26
8. Hubungan antar <i>Stakeholder</i> dalam Kerjasama .....	26
9. Hasil Identifikasi dan Peran <i>Stakeholder</i> Primer dalam Pengelolaan Ekowisata Hutan Pinus Lampung Barat Provinsi Lampung.....	33
10. Hasil Identifikasi dan Peran <i>Stakeholder</i> Kunci dalam Pengelolaan Ekowisata Hutan Pinus Lampung Barat Provinsi Lampung.....	37
11. Hasil Identifikasi dan Peran <i>Stakeholder</i> Sekunder dalam Pengelolaan Ekowisata Hutan Pinus Lampung Barat Provinsi Lampung.....	38
12. Tingkat Kepentingan <i>Stakeholder</i> .....	40
13. Tingkat Pengaruh <i>Stakeholder</i> .....	41
14. Hubungan antar <i>Stakeholder</i> dalam Komunikasi .....	44
15. Hubungan antar <i>Stakeholder</i> dalam koordinasi .....	45
16. Hubungan antar <i>Stakeholder</i> dalam Kerjasama .....	46
17. Perhitungan Tingkat Kepentingan <i>Stakeholder</i> .....	59
18. Perhitungan Tingkat Pengaruh <i>Stakeholder</i> .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	6
2. Peta Lokasi Penelitian.....	19
3. Matriks <i>Stakeholder</i> .....	24
4. Batas Wilayah Lampung Barat dan Lampung Utara .....	27
5. Pihak Pengelola Bekerjasama Membersihkan Tumpukan Sampah.....	28
6. Struktur Gapoktan Srimulya II.....	29
7. Plang Gapoktan Srimulya II.....	29
8. Pinus <i>Ecopark</i> .....	30
9. Jarak Pohon Pinus Tak Beraturan .....	31
10. Pesona Hutan Pinus.....	32
11. Pembangunan Fasilitas Bersama Seluruh <i>Stakeholder</i> Primer .....	36
12. Fasilitas berupa <i>shelter</i> .....	38
13. Matriks <i>Stakeholder</i> .....	42
14. Gajebo .....	62
15. Mushola.....	62
16. Toilet .....	63
17. Tempat Cuci Tangan.....	63
18. Fasilitas Permainan .....	64
19. Fasilitas Tempat Selfie.....	64
20. Kursi dan Tempat Sampah.....	65
21. Wahana <i>Flyingfox</i> .....	65
22. Kantin.....	66
23. Jembatan .....	66
24. Wawancara di KPH Tangkit Tebak .....	67

25. Wawancara di Dinas Pariwisata.....	67
26. Wawancara HPPHL .....	68
27. Wawancara KPA Green .....	68
28. Wawanacara Gapoktan Srimulya II .....	69
29. Wawancara Pekon Sukapura.....	69

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Perhitungan .....	59
2. Surat Keputusan Penetapan Pengurus Ekowisata Hutan Pinus .....	60
3. Dokumentasi Fasilitas .....	62
4. Dokumentasi Wawancara .....	67
5. Kuisisioner .....	70

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan Tahun 1999, hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan berdasarkan fungsinya hutan terbagi atas tiga fungsi pokok salah satunya adalah hutan lindung. Hutan lindung memiliki fungsi melindungi sistem penyangga kehidupan seperti mengatur tata air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, dan menjaga kesuburan tanah (Riniarti dan Setiawan, 2014). Namun permasalahan hutan lindung Indonesia sudah memasuki kritis sehingga hutan lindung memerlukan pengelolaan secara bijaksana dan berkelanjutan agar tetap lestari untuk mendukung tujuan dari peruntukkan pemanfaatan kawasan hutan lindung (Ginoga *et al.*, 2005).

Berdasarkan Peraturan Perundangan Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, menjelaskan bahwa pemanfaatan hutan lindung terbatas dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemungutan hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan jasa lingkungan. Pemanfaatan jasa lingkungan merupakan pemanfaatan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata (Dewi *et al.*, 2017). Ekowisata merupakan perjalanan wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian alam dan kesejahteraan alam yang berlandaskan tindakan konservasi, hal tersebut sangat menunjang karakteristik pemanfaatan hutan lindung (Hastari dan Girsang, 2019). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial, potensi ekowisata di hutan

lindung adalah program yang disarankan untuk dikembangkan di hutan lindung. Tidak boleh adanya penebangan di hutan lindung menyebabkan pengembangan ekowisata dapat dijadikan alternatif pendapatan bagi masyarakat serta pemanfaatan ekowisata merupakan potensi yang dapat dikembangkan di tingkat nasional maupun global (Wulandari, 2019).

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih banyak memiliki hutan, salah satunya adalah kawasan hutan lindung yang berada di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tangkit Tebak. Area KPH Tangkit Tebak memiliki ekowisata hutan pinus dengan daya tarik berupa area sebesar 1,7 ha yang ditumbuhi banyak pohon pinus (Sundari, 2020). Lokasi hutan ini terletak di Hutan Lindung Register 34 Tangkit Tebak dan Register 24 Bukit Punggur, Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat dan dibuka dengan izin hutan kemasyarakatan (HKm) pada tahun 2018 sebagai salah satu potensi wisata yang dikembangkan dalam KPH Tangkit Tebak (KPH Tangkit Tebak, 2018).

Ekowisata akan berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat lokal baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan apabila dapat menggabungkan antara potensi alam dari suatu kawasan hutan yang dilindungi, aspek sosial masyarakat setempat, dan partisipasi masyarakat baik sebagai pelaku maupun penyelenggara dari kegiatan ekowisata, keterlibatan masyarakat tersebut dapat dikatakan sebagai *stakeholder* (Nurkhalis *et al.*, 2018). *Stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang sifatnya mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh, langsung maupun tidak langsung, aktifitas serta kebijakan yang berlaku (Reed *et al.*, 2009). *Stakeholder* memiliki potensi untuk mendukung keberhasilan pengembangan wisata alam baik perorangan, kelompok masyarakat maupun organisasi (Widodo, 2018) dan memiliki peran berbeda yang perlu dipahami untuk pengembangan objek serta daya tarik wisata dapat terwujud dengan baik (Amalyah *et al.*, 2016).

Berdasarkan beberapa penelitian terkait *stakeholder* pada ekowisata menunjukkan pentingnya pengelolaan pemangku kepentingan secara detail mulai dari mengetahui jumlah seluruh *stakeholder* hingga pembagian peran

berdasarkan kewenangan sesuai indikator kategori *stakeholder* (Widodo *et al.*, 2018; Hernawan., *et al*). Namun berdasarkan 2 penelitian sebelumnya dilokasi yang sama pada ekowisata hutan pinus Lampung Barat Wulandari, (2019) dan Sundari, (2020) memberikan informasi berbeda mengenai *stakeholder* pada ekowisata tersebut sehingga secara tidak langsung menunjukkan belum diketahui pasti jumlah sampai pembagian peran seluruh *stakeholder* yang merupakan sebuah kendala dalam pencapaian pengembangan ekowisata berkelanjutan. Hal inilah yang menjadi landasan dilakukan penelitian ini untuk dapat mengidentifikasi, menentukan kategori serta hubungan antar *stakeholder* melalui analisis *stakeholder*.

Penelitian ini juga dimodifikasi dengan perbedaan dari penelitian sebelumnya di tahun 2019 dan 2020 terkait analisis peran *stakeholder* (Hidayah *et al.*, 2019 dan Destiana *et al.*, 2020). Dua penelitian tersebut hanya mengidentifikasi dan menentukan kategori saja namun berbeda dengan penelitian ini yaitu adanya modifikasi penambahan indikator terkait penyelidikan peran dan hubungan antar *stakeholder* dengan tiga dasar hubungan yaitu komunikasi, kerjasama, dan koordinasi sehingga peneliti memiliki harapan dengan hasil analisis *stakeholder* pada penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan ekowisata hutan pinus di Lampung Barat, Provinsi Lampung.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Siapa saja *stakeholder* dalam pengelolaan ekowisata hutan pinus di Lampung Barat ?
2. Bagaimana pembagian kategori *stakeholder* ekowisata hutan pinus di Lampung Barat ?
3. Bagaimana bentuk hubungan antar *stakeholder* ekowisata hutan pinus Lampung Barat ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi *stakeholder* dan perannya dalam pengelolaan ekowisata hutan pinus di Lampung Barat, Provinsi Lampung.
2. Menentukan kategori *stakeholder* berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya dalam pengelolaan ekowisata hutan pinus di Lampung Barat, Provinsi Lampung.
3. Menentukan hubungan antar *stakeholder* dalam pengelolaan ekowisata hutan pinus di Lampung Barat, Provinsi Lampung.

### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan gambaran untuk mengembangkan ekowisata menuju ekowisata berkelanjutan dengan mengetahui seluruh *stakeholder* dalam pengembangan ekowisata hutan pinus di Lampung Barat Provinsi Lampung.
2. Sebagai referensi bagi pihak pengelola guna penentuan langkah-langkah dan prioritas dalam mengelola *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata hutan pinus di Lampung Barat Provinsi Lampung.

### 1.5. Kerangka Pemikiran

KPH Tangkit Tebak memiliki izin HKm dengan penerapan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan, salah satunya pengelolaan ekowisata hutan pinus Lampung Barat. Ekowisata tersebut sampai saat ini masih dikelola dan dibuka sebagai objek wisata. Pengelolaan ekowisata tidak terlepas dari adanya *stakeholder*, namun pada ekowisata ini belum diketahui pasti jumlah, peran maupun hubungan antar *stakeholder* sehingga hal tersebut menjadi pokok bahasan yang digali pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis seluruh *stakeholder* pada ekowisata hutan pinus Lampung Barat Provinsi Lampung.

Komponen data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer sebagai data pokok dan sekunder sebagai pendukung penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, kuisioner, observasi lapang dan penelusuran dokumen. Penentuan sampel *stakeholder* menggunakan metode *snow-ball sampling* yaitu penentuan informan didasarkan

atas *stakeholder* lainnya (Rosalinda *et al.*, 2012). Penentuan informan dengan bantuan *stakeholder* kunci yang dipilih terlebih dahulu melalui pertimbangan yang bersangkutan mempunyai pengalaman serta pengetahuan sesuai fokus penelitian (Widodo *et al.*, 2018). *Stakeholder* kunci pada penelitian ini yaitu KPH Tangkit Tebak, Kelompok Pecinta Alam (KPA) *Green*, Himpunan Pemuda Peduli Hutan dan Lingkungan (HPPHL) serta Gapoktan Srimulya II (KPH Tangkit Tebak, 2018).

Analisis data dilakukan melalui analisis *stakeholder* merupakan suatu pendekatan dan prosedur untuk mencapai pemahaman suatu sistem dengan cara mengidentifikasi aktor-aktor kunci, menilai kepentingan serta pengaruh masing-masing *stakeholder* dalam suatu sistem (Suporaharjo, 2005). Pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu identifikasi *stakeholder*, kategori *stakeholder*, serta hubungan antar *stakeholder*.

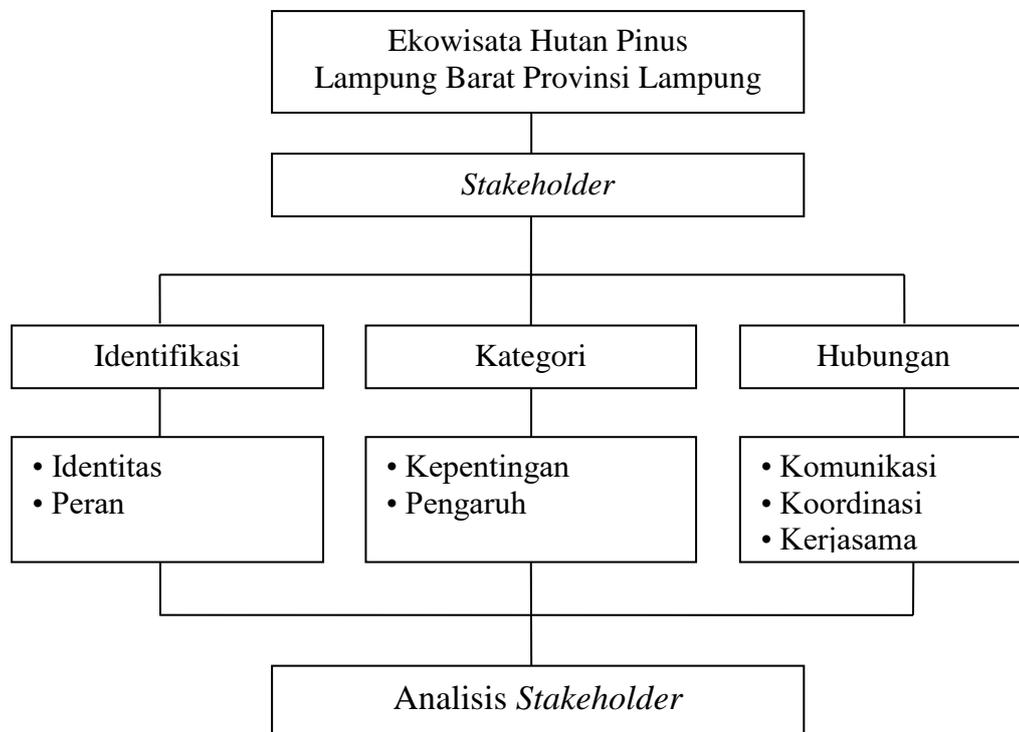
Identifikasi dilakukan untuk mengetahui *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan ekowisata (Widodo *et al.*, 2018). Identifikasi dalam penelitian ini menggunakan dua indikator antara lain identitas dan peran *stakeholder*. Menentukan kategori dilakukan dengan penafsiran matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholder* (Reed *et al.*, 2009). Penentuan kategori menggunakan kuisioner tertutup dengan pertanyaan yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif melalui penetapan skor metode *skala likert* guna mengukur tingkat kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan (Widodo *et al.*, 2018).

Penetapan skoring dengan pengukuran data berjenjang nilai skor dari lima pertanyaan yang dijumlahkan dan nilainya dipetakan ke dalam bentuk matriks kepentingan dan pengaruh (Siregar, 2011). Hasil skoring terhadap tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholder* dikelompokkan menurut jenis indikatornya lalu disandingkan membentuk koordinat dengan posisi koordinat dapat menggambarkan ilustrasi kategori yang dimainkan oleh masing-masing *stakeholder* (Widodo *et al.*, 2018). *Stakeholder* terbagi ke dalam 4 golongan yaitu *key player*, *subject*, *context setter*, dan *crowd* (Reed *et al.*, 2009).

Hubungan antar *stakeholder* merupakan gambaran dari hubungan antar *stakeholder* baik yang tertulis di dalam dokumen (tupoksi) maupun yang

terlaksana di lapangan dengan metode deskripsi dan dikelompokkan menjadi hubungan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan menggunakan indikator terkait komunikasi (Muhammad, 2011), koordinasi (Mare *et al.*, 2020) dan kerjasama (West, 2002). Indikator tersebut dimodifikasi penulis guna menyesuaikan penelitian ini sehingga akan terlihat bentuk dari hubungan antar *stakeholder*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ekowisata hutan pinus di Lampung Barat Provinsi Lampung. Bagan kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pemikiran.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Gambaran Umum Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tangkit Tebak

Tipe hutan berdasarkan fungsinya yang ada di Provinsi Lampung antara lain hutan lindung atau Hutan Kemasyarakatan (Safe'i *et al.*, 2019). KPH Tangkit Tebak merupakan salah satu hutan lindung tersebut dengan letak wilayah secara geografis terletak antara 104° 29' 9,1" BT - 104° 44' 18,4" BT dan 04° 53' 36,5" LS - 05° 04' 42,5" LS berbatasan dengan empat wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Utara, yaitu Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Abung Tinggi, Kecamatan Tanjung Raja, dan Kecamatan Abung Pekurun berada dalam Daerah Aliran sungai (DAS) Tulang Bawang dan DAS Seputih dengan Luas wilayah 27.876 ha (KPH Tangkit Tebak, 2018).

KPH Tangkit Tebak merupakan deretan wilayah berbukit dan bergunung terletak pada ketinggian antara 749 - 816 mdpl dengan topografi kelerengan landai sampai sangat curam sebesar 8 - 45 %, geologi termasuk dalam *quarter, oligosen - miosen* dan kapur dalam kelas batuan *volcanic (breksi, lava dan tuf, andesit sampai bas)*, kelas *sediment* (batu pasir, batu lumpur dan batubara) dan kelas *granitoid* (granit, *granodiorite* dan *diorit*) serta memiliki tiga kelompok tanah yaitu tanah bentuk (*Miscellaneous*), tanah perbukitan, dan tanah *volkan* (KPH Tangkit Tebak, 2018). Wilayah KPH Tangkit Tebak, terutama di lokasi penelitian di Lampung Barat Sumberjaya didominasi oleh kebun kopi sejak alih fungsi lahan dari zaman kolonial belanda (Sanudin *et al.*, 2016). Wilayah Kerja KPH Tangkit Tebak Kecamatan Sumberjaya termasuk dalam tipe iklim A tidak memiliki bulan kering dengan curah hujan rata - rata 2614 mm /tahun serta suhu udara rata-rata harian 21,2°C (Agus *et al.*, 2002).

## 2.2. Ekowisata Hutan Pinus

Ekowisata hutan pinus merupakan ekowisata hutan yang banyak ditumbuhi pohon pinus berusia sekitar 50 tahun, ekowisata ini juga dikenal dengan nama Pinus *Ecopark* dengan lokasi berada dekat dengan tugu ucapan selamat datang di Kabupaten Lampung Barat (Sundari, 2020). Melalui izin HKm hutan pinus ini dikelola sebagai tempat wisata dengan beberapa pengurus ekowisata Pinus *Ecopark* yang berasal dari Masyarakat pekon Sukapura, Kelompok Pecinta Alam (KPA) *Green*, Himpunan Pemuda Peduli Hutan dan Lingkungan (HPPHL) serta Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) Srimulya II (Wulandari, 2019).

Hutan Pinus terletak di Kecamatan Sumberjaya secara geografis berada antara 04°98' LS - 05°07' LS dan 104°23' BT - 104°34' BT, berada di sub daerah aliran sungai Way Besai, Kabupaten Lampung Barat (Soeharto *et al.*, 2012). Puluhan tahun kawasan ini dibiarkan secara alami sehingga kawasan ini sempat menjadi tempat dari beberapa orang yang tidak bertanggungjawab dengan membuang sampah sembarangan yang menyebabkan tumpukan sampah plastik maupun lainnya mengganggu pemandangan (Sundari, 2020). Namun setelah dikelola menjadi objek wisata, kawasan ini tertata indah bersih dan juga tersedia beberapa spot untuk foto serta dikenal sebagai sumber lokasi dengan udara dingin, bahkan saat pagi hari kabut sering menyelimuti kawasan (Setyawan dan Sundari, 2020).

## 2.3. Kesatuan Pengelola Hutan (KPH)

KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Secara konseptual pembangunan KPH diyakini sebagai salah satu cara memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia (Sulistya, 2010). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6

tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, KPH menjadi inti dari kebijakan pengelolaan Indonesia.

KPH merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah untuk mewujudkan pemanfaatan hutan yang lestari dengan konsep pengelolaan hutan hingga tingkat tapak dengan karakteristik tersendiri baik ditinjau dari potensi hutan yang ada, biofisik, produk hutan, fasilitas pengelola KPH, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta dukungan pemerintah daerah antara KPH satu dengan lainnya (Budiningsih *et al.*, 2015). Kebijakan pembangunan KPH juga menjadi proses pergeseran institusi untuk membawa hadirnya perubahan pada cara berpikir, sistem nilai, dan budaya Indonesia dalam mengelola hutan di Indonesia (Ichsan, 2018). Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan solusi yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi konflik lahan hutan di Indonesia (Setiawan *et al.*, 2018)

Kebijakan KPH diharapkan sebagai *enabling condition* terhadap upaya memperbaiki tata kelola hutan, memperlambat laju degradasi, mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan, melaksanakan perlindungan dan mengamankan hutan, melaksanakan optimalisasi pemanfaatan hutan, meningkatkan stabilitas pasokan hasil hutan, dan menyediakan data informasi kawasan hutan (Maryudi, 2016). Pengelolaan hutan secara lestari dapat diwujudkan dengan pembagian habis seluruh kawasan hutan ke dalam KPH baik Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Ruhimat, 2010).

Pencapaian kebijakan pembentukan KPH yaitu memberikan kepastian areal kerja pengelolaan hutan, wilayah tanggung jawab pengelolaan, serta satuan perencanaan pembangunan dan pengelolaan hutan, sebagai dasar tercapainya pengelolaan hutan secara lestari (Departemen Kehutanan, 2006). KPH difokuskan untuk menjawab kebutuhan unit pengelolaan hutan di tingkat tapak dan pengelolaan organisasinya untuk mencapai kelestarian (Kartodihardjo *et al.*, 2011). KPH dibentuk bukan untuk menggantikan lembaga kehutanan di daerah, melainkan menguatkan fungsi lembaga kehutanan di daerah sehingga pembentukan KPH didasarkan pada proses yang dapat mengakomodasikan kekhasan dan aspirasi daerah, penetapan tujuan usaha, karakteristik sumberdaya

hutan, batas administrasi wilayah, serta kapasitas dan kapabilitas lembaga yang akan terlibat (Supratman, 2019).

Tingkat keberhasilan pembangunan KPH dipengaruhi oleh pengetahuan pengelola KPH terhadap konsep KPH, tujuan pokok dan fungsi KPH, serta pengelolaan tingkat tapak (Budiningsih *et al.*, 2015). KPH ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi hutan, lintas wilayah administrasi pemerintahan dan atau dalam satu wilayah administrasi dengan luasan KPH memperhatikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan pada suatu wilayah (Rizal *et al.*, 2011).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan disebutkan bahwa organisasi KPH yang ditetapkan harus memiliki sebuah organisasi pengelola hutan yang mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dari pemanfaatan hutan dalam keseimbangan dengan fungsi konservasi, perlindungan, dan sosial dari hutan, mampu mengembangkan investasi menggerakkan lapangan kerja, mempunyai kompetensi menyusun perencanaan dan monitoring atau evaluasi berbasis spasial, mempunyai kompetensi untuk melindungi kepentingan hutan (termasuk kepentingan publik dari hutan), mampu menjawab jangkauan dampak pengelolaan hutan yang bersifat lokal, nasional dan sekaligus global, serta berbasis pada profesionalisme kehutanan. Pembentukan KPH harus menghormati keberadaan unit-unit (izin-izin) pemanfaatan hutan yang ada, struktur organisasi, rincian tugas dan fungsinya memberikan jaminan mampu memfasilitasi terselenggaranya pengelolaan hutan lestari dan fleksibel untuk menyesuaikan kondisi atau tipologi setempat serta perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pengelolaan hutan (Sulistya, 2010).

Pembentukan KPH untuk meningkatkan efektivitas pembangunan kehutanan dalam upaya pencapaian pengelolaan hutan lestari sehingga dapat terus mengurangi laju degradasi hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, stabilnya penyediaan hasil hutan, dan berkembangnya tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan (Alviya dan Suryandari, 2008). KPH Tangkit Tebak memiliki Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (RPHJP KPH) dengan unsur-unsur tujuan yang akan dicapai, kondisi yang

dihadapi, dan strategi pengembangan pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, salah satunya pengelolaan potensi ekowisata (KPH Tangkit Tebak, 2018).

#### **2.4. Hutan Kemasyarakatan (HKm)**

HKm merupakan salah satu skema dari perhutanan sosial dengan adanya HKm diharapkan kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Nandini, 2013). Keterbatasan akses lahan masyarakat di sekitar hutan tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu penyebab deforestasi dan degradasi sehingga munculnya konsep perhutanan sosial (Laksemi *et al.*, 2019). Dipertegas pendapat Yudischa *et al.*, (2014) bahwa HKm merupakan suatu skema pemberdayaan masyarakat melalui penguatan faktor produksi hasil hutan bukan kayu berupa akses terhadap lahan hutan, utamanya hutan lindung. Bagi Provinsi Lampung, Hkm diharapkan dapat mencegah kerusakan hutan yang masih tersisa dan merehabilitasi hutan yang rusak dengan melibatkan sepenuhnya peran serta masyarakat di sekitar hutan (Rosalia dan Ratnasari, 2016).

Program HKm merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan hutan sekaligus memberikan manfaat pada masyarakat (Winarni *et al.*, 2016). Senada menurut Sanjaya *et al.*, (2017) izin HKm adalah program untuk mengatasi aktivitas masyarakat terhadap tekanan sumber daya hutan. Salah satu upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sekitar hutan adalah dengan melakukan interaksi dengan kawasan hutan (Safira *et al.*, 2017).

HKm merupakan penunjang kesejahteraan masyarakat setempat. HKm diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat yang tinggal hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan menjaga aspek kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup sesuai konsep HKm untuk menekan proses deforestasi, dengan mengikut sertakan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan (Muttaqin *et al.*, 2017). HKm diimplementasikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk memiliki kemampuan dan kemandirian dalam memanfaatkan hutan juga

menjadi salah satu upaya dalam melestarikan kawasan hutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar hutan (Puspita *et al.*, 2020).

Program HKm memberikan model tata kelola hutan alternatif sehingga dapat mencapai bentuk desentralisasi tata kelolahutan yang sedang dilaksanakan di Indonesia (Kaskoyo *et al.*, 2017). Program HKm KPH Tangkit Tebak berupa pengelolaan ekowisata hutan pinus Lampung Barat ditetapkan pada tahun 2018 masuk kedalam Hkm Gapoktan Srimulya II untuk mengelola kawasan hutan lindung dengan luasan 52.053 ha yang berada di sekitar Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya. Gapoktan Srimulya II terdiri dari tiga kelompok tani hutan (KTH) dengan nama KTH sub I-III (KPH Tangkit Tebak, 2018 ).

## **2.5. Jasa Lingkungan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung. Hutan lindung adalah kawasan terbatas, namun memiliki banyak potensi yang akan menjadi mubazir jika tidak dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan definisi ini menunjukkan bahwa terdapat potensi besar yang terkandung pada hutan lindung, seperti halnya potensi jasa lingkungan untuk menunjang kelangsungan hidup manusia sebagai upaya mendapatkan keuntungan tanpa merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya (Soenarno, 2015). Upaya menjaga kelestarian hutan yang diikuti dengan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana oleh masyarakat dapat memberikan penghidupan yang baik bagi mereka (Indrasari *et al.*, 2017).

Menurut hasil penelitian dari proyek *Rewards For Use of And Shared Investment in Pro-Poor Environmental Service/RUPES* (2009), definisi jasa lingkungan adalah penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami, dan pelestarian nilai budaya oleh sukseksi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan, dengan demikian pemanfaatan jasa lingkungan sebagai upaya pemanfaatan potensi jasa (baik berupa jasa penyediaan maupun jasa pendukung). Potensi jasa lingkungan KPH Tangkit Tebak yang telah dikembangkan antara lain pemanfaatan potensi alam berupa pengelolaan ekowisata dan memanfaatkan potensi jasa lingkungan air dengan melihat kondisi

faktual di wilayah KPH Tangkit Tebak seperti adanya sungai Way Besai dan air terjun yang dapat dimanfaatkan untuk tenaga mikrohidro yang menghasilkan listrik dan sumber air bersih (KPH Tangkit Tebak, 2018).

## **2.6. Ekowisata**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/2016 tentang perhutanan sosial menyebutkan bahwa potensi ekowisata hutan lindung adalah program yang disarankan untuk dikembangkan. Dipertegas Affandy *et al.*, (2016) bahwa salah satu produk hasil hutan bukan kayu yang memiliki potensi dan keunggulan adalah Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW). Dalam hutan lindung tidak boleh ada penebangan sehingga pengembangan ekowisata dapat dijadikan alternatif pendapatan bagi masyarakat sebagai salah satu bentuk kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan yaitu dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya, aspek ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan yang disebut dengan ekowisata (Sufi dan Nurpeni, 2018).

Ekowisata merupakan bentuk pariwisata dominan dengan kaidah keindahan alamnya, mempunyai unsur pendidikan, dan mendukung pengembangan kelembagaan masyarakatnya untuk dikembangkan di hutan lindung karena dapat menambah pendapatan masyarakat karena adanya larangan penebangan dalam memanfaatkan hasilnya (Wulandari, 2019). Ekowisata memiliki harmonisasi antara alam dengan masyarakat (Alfatianda dan Djuwendah, 2017). Prinsip dalam ekowisata harus adanya kolaborasi yang apabila alam dijaga dan dilestarikan maka masyarakat akan mendapatkan dampak yang positif dari alam baik itu dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan obyek alam yang menarik dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekowisata (Fandeli, 2002).

Ekowisata dapat meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya sehingga memberikan nilai tambah kepada pengunjung masyarakat dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman dengan bentuk wawasan lingkungan yang mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya, ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan (Pulungan, 2013). Selain itu keterlibatan masyarakat di lokasi

wisata merupakan salah satu prasyarat dalam keberhasilan pengembangan pariwisata berkelanjutan (Siswanto dan Moeljadi, 2015). Pengembangan ekowisata di daerah merupakan potensi sumberdaya alam, lingkungan, serta keunikan alam dan budaya, yang dapat menjadi sektor unggulan sebuah daerah yang belum dikelola dan dikembangkan secara optimal (Amiruddin dan Zulkifli, 2020).

Menurut Widowati dan Nadra (2013), suatu wisata dikatakan berkelanjutan apabila memenuhi syarat yaitu:

1. Berkelanjutan secara ekologis yaitu bahwa pembangunan pariwisata tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem setempat, dan kegiatan konservasi dilaksanakan sebagai upaya untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan.
2. Berkelanjutan secara sosial dan budaya artinya kemampuan masyarakat lokal dalam menerima kegiatan pariwisata tanpa menimbulkan konflik sosial. sedangkan berkelanjutan budaya artinya bahwa masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan budaya wisatawan yang memiliki latar belakang berbeda.
3. Berkelanjutan secara ekonomi yaitu bahwa kegiatan pariwisata akan memberikan keuntungan secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.

Kegiatan ekowisata pada dasarnya membawa dampak positif untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sekitar objek wisata, meningkatkan upaya konservasi sumber daya alam, perlindungan pantai dan taman laut (Damanik dan Janianton, 2009). Secara sederhana konsep ekowisata menghubungkan antara perjalanan wisata alam yang memiliki visi dan misi konservasi dan kecintaan lingkungan (Boedirochminarni dan Suliswanto, 2017). Pengembangan ekowisata juga bertujuan dapat mensejahterakan penduduk setempat (Vianti *et al.*, 2019).

*The International Ecotourism Society* (2016) mendefinisikan ekowisata sebagai proses interpretasi dan pendidikan atau pembelajaran bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan ekowisata, seperti pengelola, masyarakat dan wisatawan. Perencanaan dan pengembangan ekowisata memiliki tiga perspektif yang perlu diperhatikan, yaitu ekowisata sebagai produk, sebagai pasar, serta sebagai

pendekatan pengembangan (Susilawati, 2016). Ekowisata memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi penyelenggara, pemerintah dan masyarakat setempat, melalui kegiatan-kegiatan yang non ekstraktif, sehingga meningkatkan perekonomian daerah setempat dan dapat menjamin kesinambungan usaha (Kurniasari *et al.*, 2013).

Sulistiyawati (2011), menuliskan hasil Lokakarya dan Pelatihan Ekowisata Nasional 2006 mengenai prinsip-prinsip dan kriteria ekowisata sebagai berikut:

1. Prinsip memiliki kepedulian, komitmen dan tanggungjawab terhadap konservasi dan warisan budaya.
2. Prinsip menyediakan pemahaman yang dapat memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam dan meningkatkan kecintaannya terhadap alam.
3. Prinsip memberdayakan dan mengoptimalkan partisipasi serta sekaligus memberikan kontribusi secara berkelanjutan terhadap masyarakat setempat.
4. Prinsip peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat.
5. Prinsip mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Prinsip pengembangannya harus didasarkan atas musyawarah dan dengan persetujuan masyarakat setempat.
7. Prinsip secara konsisten memberikan kepuasan kepada konsumen.
8. Prinsip dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur dan akurat sehingga sesuai dengan harapan (pemasaran yang bertanggungjawab).
9. Prinsip pengelolaan yang serasi dan seimbang sesuai dengan konsep *Tri Hita Karanaya* yang memiliki arti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dengan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan sehingga konsep seimbang ini dibutuhkan dalam pengelolaan ekowisata.

Berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang pada KPH Tangkit Tebak (2018), ekowisata yang ada di wilayah kerja KPH Tangkit Tebak cukup banyak yang telah dikelola melalui izin HKm antara lain yaitu :

1. Curup Ekor Kuda

Curup Ekor Kuda berada di Kawasan Hutan Lindung Register 34 Tangkit Tebak dan berdekatan dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning. Curup Ekor Kuda adalah air terjun dengan ketinggian 50 meter dengan akses yang relatif mudah, dan dekat dengan jalan raya sehingga sangat potensial untuk dikembangkan.

#### 2. Curup Mekar Jaya

Curup Mekar Jaya berada di Kawasan Hutan Lindung Register 34 Tangkit Tebak dan berdekatan dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raja. Curup Mekar Jaya adalah air terjun dengan ketinggian 100 meter dengan akses yang relatif sulit.

#### 3. Curup Mandi Angin

Curup Mandi Angin berada di Kawasan Hutan Lindung Register 34 Tangkit Tebak dan berdekatan dengan Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja. Curup Mandi Angin adalah air terjun dua tingkat dengan ketinggian 30 meter dan 40 meter dengan akses jalan setapak yang dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua.

#### 4. Curup Karang Sari

Curup Karang Sari berada di Kawasan Hutan Lindung Register 34 Tangkit Tebak dan berdekatan dengan Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja. Curup Karang Sari adalah air terjun dengan ketinggian 60 meter dengan akses jalan setapak dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua.

#### 5. Sumber Air Panas Kali Anget

Sumber Air Panas Kali Anget berada di Kawasan Hutan Lindung Register 34 Tangkit Tebak dan berdekatan dengan Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja. Sumber Air Panas Kali Anget dapat diakses melalui jalan setapak dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua.

#### 6. Bukit Kereta dan Hutan Pinus

Bukit kereta dapat dibuat wisata pandang mengarah ke Bendungan Way Besai. Bukit kereta berada di Kawasan Hutan Lindung Register 34 Tangkit Tebak dan dapat diakses dengan kendaraan roda dua. Sedangkan Hutan Pinus berada di sisi jalan raya Sumberjaya - Bukit Kemuning dan di Hutan Lindung Register 34 Tangkit Tebak dan Register 24 Bukit Punggur.

### 7. Sungai Way Rarem

Sungai Way Rarem hulunya berada di Kawasan Hutan Lindung Register 34 Tangkit Tebak dan berdekatan dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Raja. Sungai Way Rarem mempunyai potensi untuk wisata air arung jeram.

### 8. Sungai Way Abung

Sungai Way Abung hulunya berada di Kawasan Hutan Lindung Register 34 Tangkit Tebak dan berdekatan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Bukit Kemuning. Sungai Way Abung mempunyai potensi untuk wisata air arung jeram dan dapat diintegrasikan dengan curup ekor kuda.

## 2.7. Stakeholder

*Stakeholder* adalah suatu pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proyek maupun kepentingan (Manullang, 2018). *Stakeholder* sebagai seluruh pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan dengan sifatnya yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh langsung maupun tidak langsung terhadap aktifitas maupun kebijakan yang berlaku (Reed *et al.*, 2009). Istilah lain yang digunakan untuk menggantikan istilah *stakeholder* dalam bahasa sehari-hari dan perbedaan konotasi yang sangat tipis diantaranya adalah aktor, aktor kunci, kelompok aktor, aktor sosial, dan partai (Groenendijk, 2003). Selain itu juga terdapat istilah pemangku kepentingan sebagai orang atau kelompok yang melakukan tindakan pengembangan terhadap suatu hal (Putri, 2020).

*Stakeholder* memiliki potensi sebagai pendukung keberhasilan pengembangan wisata alam baik perorangan, kelompok masyarakat ataupun organisasi (Widodo, 2018). *Stakeholder* terbagi atas beberapa kategori *key player*, *context setter*, *subjects*, dan *crowd* (Siregar, 2011). Adanya *stakeholder* dapat membantu keberhasilan pembangunan pariwisata melalui komunikasi yang positif (Simanjorang *et al.*, 2020).

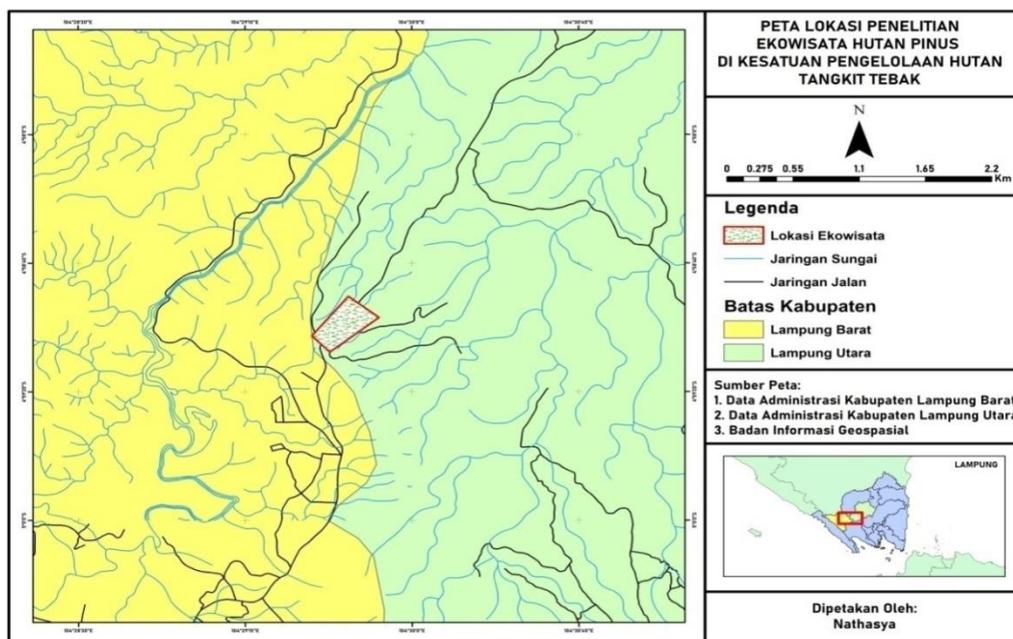
Analisis *stakeholder* adalah pendekatan dan prosedur untuk mencapai pemahaman suatu sistem dengan mengidentifikasi aktor-aktor kunci dalam sebuah sistem, serta menilai kepentingan dan pengaruh masing-masing didalam sistem

tersebut untuk mengumpulkan informasi secara kualitatif untuk menentukan kepentingan siapa yang harus diperhitungkan dalam menerapkan suatu kebijakan atau program disuatu perencanaan yang telah ditetapkan sehingga secara lebih riil fokus dalam menyelesaikan permasalahan (Suporahardjo, 2005). Analisis *stakeholder* dilakukan dengan cara antara lain mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menyelidiki hubungan antar *stakeholder* oleh responden kunci (Reed *et al.*, 2009). Responden atau informan kunci adalah lembaga atau individu yang berwenang secara legal dalam pengambilan keputusan (Yeny, 2014). *Stakeholder* kunci ekowisata hutan pinus Lampung Barat terdiri dari beberapa pihak antara lain pemerintah pusat, Lembaga Swadaya masyarakat dan masyarakat lokal (KPH Tangkit Tebak, 2018).

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di ekowisata hutan pinus Lampung Barat Provinsi Lampung. Lokasi dipilih dengan pertimbangan adanya informasi berbeda terkait jumlah *stakeholder* di lokasi ekowisata hutan pinus Lampung Barat berdasarkan 2 penelitian sebelumnya Wulandari (2019) dan Sundari (2020) sehingga diduga belum diketahui pasti jumlah seluruh *stakeholder* dan pembagian peran *stakeholder* yang merupakan kendala dalam pengembangan ekowisata. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2022. Aksesibilitas menuju lokasi ekowisata hutan pinus mudah dapat dijangkau dengan transportasi roda dua maupun roda empat karena lokasi yang berada tepat disisi jalan raya Sumberjaya. Peta Lokasi Penelitian disajikan pada



Gambar 2. Peta lokasi penelitian

### 3.2. Alat dan Objek Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner atau daftar pertanyaan, kamera, dan alat tulis dan objek yang diteliti adalah seluruh *stakeholder* ekowisata hutan pinus Lampung Barat Provinsi Lampung. Wawancara dilakukan pada *stakeholder* kunci yaitu KPH Tangkit Tebak, Kelompok Pecinta Alam (KPA) *Green*, Lingkungan Bina Wana (HPPHL BW), dan Gapoktan Srimulya II.

### 3.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi identitas dan peran responden guna identifikasi *stakeholder*, kepentingan dan pengaruh guna kategori *stakeholder*, dan kerjasama, koordinasi, dan komunikasi guna hubungan *stakeholder*. Data sekunder meliputi data terkait fasilitas yang ada pada ekowisata hutan pinus Lampung Barat Provinsi Lampung sebagai data pelengkap penelitian.

### 3.4. Penentuan Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *snow-ball sampling* yaitu penentuan responden didasarkan atas pemangku kepentingan lainnya (Rosalinda *et al.*, 2012). Penentuan responden dengan bantuan *stakeholder* kunci yang dipilih melalui pertimbangan yang bersangkutan memiliki pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan fokus penelitian Widodo (2018). *Stakeholder* kunci merupakan lembaga atau individu yang berwenang secara legal dalam pengambilan keputusan (Yeny, 2014). *Stakeholder* kunci pada penelitian ini yaitu Kepala KPH Tangkit Tebak, Ketua Kelompok Pecinta Alam (KPA) *Green*, Himpunan Pemuda Peduli Hutan dan Lingkungan (HPPHL), Ketua Gapoktan Srimulya II, dan Ketua Pekon Sukapura.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*), kuisioner (Lampiran 1), observasi di

lapangan, dan penelusuran dokumen berdasarkan tujuan penelitian (Tabel 1). Pengumpulan data dilakukan dengan menetapkan terlebih dahulu *stakeholder* kunci yang terlibat berdasarkan peran yang dimiliki *stakeholder* yang potensial terkait dengan pengelolaan ekowisata (Widodo, 2018). Sementara pemilihan organisasi/kelompok terpilih seterusnya dilakukan melalui metode *snowball sampling* berdasarkan rekomendasi dari informan kunci sebelumnya.

Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data Menurut Tujuan

No	Tujuan	Data yang dikumpulkan	Metode Pengambilan Data
1	Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> dan perannya dalam pengelolaan ekowisata hutan pinus di Lampung Barat, Provinsi Lampung	Identitas dan peran <i>stakeholder</i>	Wawancara, observasi lapang, dan penelusuran dokumen
2	Menentukan kategori berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya dalam pengelolaan ekowisata hutan pinus di Lampung Barat, Provinsi Lampung	Kepentingan dan pengaruh <i>stakeholder</i>	Kuisisioner
3	Menentukan hubungan antar <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan ekowisata hutan pinus di Lampung Barat, Provinsi Lampung	Bentuk kerjasama, komunikasi, dan koordinasi <i>stakeholder</i>	Wawancara, observasi lapang, dan penelusuran dokumen

### 3.6. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui analisis *stakeholder* adalah suatu pendekatan dan prosedur untuk mencapai pemahaman suatu sistem dengan cara mengidentifikasi aktor-aktor kunci didalam sistem, dan menilai kepentingan dan pengaruh masing-masing didalam sistem tersebut (Suporaharjo, 2005). Analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini

disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ada tiga tahapan dalam analisis *stakeholder* yang mengacu pada Reed *et al.*, (2009), yaitu: (1) identifikasi, (2) kategori, dan (3) hubungan *stakeholder* yang terikat dalam pengelolaan ekowisata hutan pinus Lampung Barat Provinsi Lampung.

### 3.6.1. Identifikasi *Stakeholder*

Identifikasi *stakeholder* merupakan proses yang dilakukan secara berulang hingga ditetapkan *stakeholder* yang benar-benar mengetahui permasalahan (Siregar, 2011). Identifikasi dilakukan untuk mengetahui *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan ekowisata dengan *stakeholder* yang dipilih melalui pertimbangan yang bersangkutan memiliki pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan fokus penelitian (Widodo *et al.*, 2018).

Data *stakeholder* yang diperoleh kemudian diverifikasi kebenarannya oleh responden kunci. Responden/informan kunci adalah lembaga atau individu yang berwenang secara legal dalam pengambilan keputusan (Yeny, 2014). Responden kunci pada penelitian ini terdapat pada Tabel 2.

Identifikasi peran *stakeholder* pada penelitian ini terbagi menjadi 5 yaitu *policy creator* atau pembuat kebijakan adalah *stakeholder* yang berperan sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan, koordinator adalah *stakeholder* yang harus mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan *stakeholder* terkait, fasilitator adalah *stakeholder* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan, implementer adalah *stakeholder* pelaksana kebijakan, akselerator adalah *stakeholder* yang mempercepat program tepat waktu dan sasaran (Nugroho, 2014). Analisis data untuk tahap identifikasi seperti pada Tabel 3.

Tabel 2. Daftar *Stakeholder* Kunci

No	<i>Stakeholder</i>	Organisasi/Kelompok
1.	Pemerintah Daerah	KPH Tangkit Tebak
2.	Lembaga Swadaya Masyarakat	Kelompok Pecinta Alam (KPA) Green, Himpunan Pemuda Peduli Hutan dan Lingkungan (HPPHL)
3.	Masyarakat Lokal	Gapoktan Srimulya II

Tabel 3. Peran *Stakeholder*

No	<i>Stakeholder</i>	Peran	Deskripsi
1.	KPH Tangkit Tebak		
2.	Kelompok Pecinta Alam (KPA) <i>Green</i>		
3.	Himpunan Pemuda Peduli Hutan dan Lingkungan (HPPHL)		
4.	Gapoktan Srimulya II		

### 3.6.2. Kategori *Stakeholder*

Kategori *stakeholder* dipetakan melalui matriks nilai penting dan pengaruh seluruh *stakeholder* mengacu pada Reed *et al.*, (2009) dengan bantuan *Microsoft excel*. Penyusunan matriks pengaruh dan kepentingan dilakukan atas dasar deskripsi pertanyaan yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (skor) dikelompokkan menurut kriteria pengaruh dan kepentingan (Widodo *et al.*, 2018). Ukuran kuantitatif menggunakan *skala likert* (Budiaji, 2013). Pada penelitian ini kriteria untuk kategori *stakeholder* dapat dilihat pada Tabel 4.

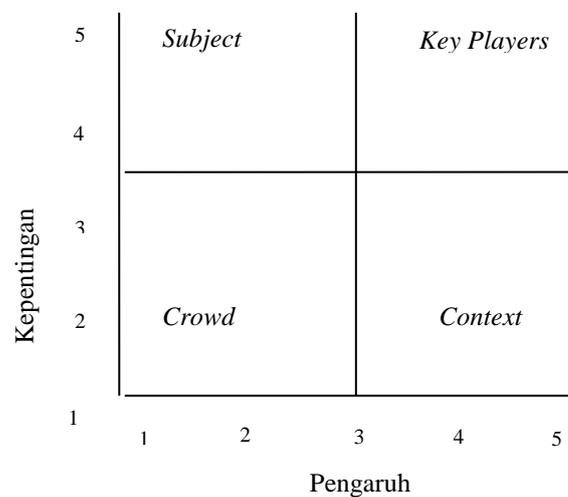
Tabel 4. Kriteria Tingkat Kepentingan dan Pengaruh

Skor	Kriteria	Keterangan
<i>Kepentingan Stakeholder</i>		
1	Rendah	Tidak mendukung pengembangan ekowisata
2	Kurang Tinggi	Kurang mendukung pengembangan ekowisata
3	Cukup Tinggi	Cukup mendukung pengembangan ekowisata
4	Tinggi	Mendukung pengembangan ekowisata
5	Sangat Tinggi	Sangat mendukung pengembangan ekowisata
<i>Pengaruh Stakeholder</i>		
1	Rendah	Tidak mempengaruhi pengembangan ekowisata
2	Kurang Tinggi	Kurang mempengaruhi pengembangan ekowisata
3	Cukup Tinggi	Cukup mempengaruhi pengembangan ekowisata
4	Tinggi	Mempengaruhi pengembangan ekowisata
5	Sangat Tinggi	Sangat mempengaruhi pengembangan ekowisata

Analisis data untuk tahapan kategori *stakeholder* melalui *microsoft excel* dengan mengolah nilai skor dari lima pertanyaan kemudian hasil skoring terhadap tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholder* dikelompokkan menurut jenis indikatornya lalu disandingkan sehingga

membentuk koordinat. Posisi koordinat dapat menggambarkan ilustrasi dan peranan yang dimainkan oleh masing-masing *stakeholder* (Siregar, 2011). Menurut Reed *et al.*, (2009), hasil klasifikasi *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya posisi *stakeholder* terbagi ke dalam empat golongan disajikan pada Gambar 3. Posisi *stakeholder* dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. *Key Players* merupakan *stakeholder* yang memiliki nilai penting dan pengaruh tinggi dalam pengelolaan ekowisata hutan pinus Lampung Barat.
2. *Subjek* merupakan *stakeholder* yang memiliki nilai penting tinggi namun pengaruhnya rendah dalam pengelolaan ekowisata hutan pinus Lampung Barat.
3. *Context setter* merupakan *stakeholder* yang memiliki pengaruh tinggi namun nilai pentingnya rendah dalam pengelolaan ekowisata hutan pinus Lampung Barat.
4. *Crowd* merupakan *stakeholder* yang memiliki nilai penting dan pengaruh rendah dalam pengelolaan ekowisata hutan pinus Lampung Barat.



Gambar 3. Matriks *stakeholder*.

### 3.6.3. Hubungan *Stakeholder*

Hubungan *stakeholder* ditentukan berdasarkan data hasil wawancara, observasi lapang dan penelusuran dokumen. Hubungan *stakeholder* dianalisis dengan metode deskriptif berdasarkan pengelompokkan terhadap hubungan

antar *stakeholder* baik yang tertulis di dalam dokumen (tupoksi) maupun yang terlaksana di lapangan (Widodo *et al.*, 2018). Pengelompokan hubungan *stakeholder* pada penelitian ini terbagi atas 3 dasar hubungan yaitu komunikasi, koordinasi dan kerjasama. Indikator pengelompokan hubungan berdasarkan penelitian sebelumnya terkait komunikasi (Muhammad, 2011), koordinasi (Mare *et al.*, 2020 ) dan kerjasama (West, 2002). Indikator tersebut dimodifikasi penulis guna menyesuaikan penelitian ini. Indikator dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Indikator Komunikasi, Koordinasi, Kerjasama

No	Keterangan	Indikator
1.	Komunikasi	- Keterbukaan - Empati - dukungan - Rasa positif - Kesamaan
2.	Koordinasi	- Komunikasi - Pembagian Peran - Kompetensi - Kesepakatan dan komitmen - Kontinuitas
3.	Kerjasama	- Komunikasi - Koordinasi - Tanggung jawab - Saling berkontribusi dan kompak - Evaluasi

Analisis data untuk tahapan hubungan *stakeholder* akan berupa tabel hubungan antar *stakeholder* dengan kelima indikator dari masing-masing ketiga kriteria hubungan yaitu komunikasi, koordinasi, dan kerjasama sehingga akan terlihat hubungan *stakeholder* dengan keterangan detail melalui indikator hubungan pada penelitian ini seperti pada Tabel 6, 7, dan 8.

Tabel 6. Hubungan antar *Stakeholder* dalam Komunikasi

	KPH	Green	HPPL	Gapoktan
KPH				
Green				
HPPL				
Gapoktan				

Keterangan :

1. Keterbukaan    2. Empati    3. Dukungan    4. Rasa Positif    5. Kesamaan

Tabel 7. Hubungan antar *Stakeholder* dalam Koordinasi

	KPH	Green	HPPL	Gapoktan
KPH				
Green				
HPPL				
Gapoktan				

Keterangan :

1. Komunikasi    2. Pembagian Peran    3. Kompetensi    4. Kesepakatan dan  
Komitmen    5. Kontinuitas

Tabel 8. Hubungan antar *Stakeholder* dalam Kerjasama

	KPH	Green	HPPL	Gapoktan
KPH				
Green				
HPPL				
Gapoktan				

Keterangan :

1. Komunikasi    2. Koordinasi    3. Tanggungjawab    4. Saling Berkontribusi dan  
Kompak  
5. Evaluasi

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1.Simpulan

1. Ekowisata hutan Pinus Lampung Barat terdiri atas enam *stakeholder* yaitu Gapoktan Srimulya II, Pekon Sukapura, KPA *Green*, HPPHL, KPH Tangkit Tebak, dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Lampung Barat. Terdapat empat *stakeholder* primer, satu *stakeholder* kunci, dan satu *stakeholder* sekunder. Dengan peran *stakeholder* primer yaitu Gapoktan Srimulya II, Pekon Sukapura, KPA *Green*, dan HPPHL mencakup lima indikator sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator. *Stakeholder* kunci yaitu KPH Tangkit Tebak berperan sebagai fasilitator. *Stakeholder* sekunder yaitu Dinas Pariwisata berperan sebagai fasilitator dan implementer. Pembagian peran terhadap seluruh *stakeholder* dapat dikatakan cukup merata sesuai kedudukan tiap *stakeholder* sehingga dapat menunjang laju perkembangan ekowisata hutan pinus menjadi lebih pesat.
2. Pembagian kategori berdasarkan tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan *stakeholder* menggambarkan seluruh posisi *stakeholder* ekowisata hutan pinus Lampung Barat terletak pada kuadran *key players* dan *context setters* dalam matriks *stakeholder*. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi *stakeholder* primer memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi serta *stakeholder* kunci dan sekunder memiliki pengaruh yang tinggi untuk mendukung ekowisata sehingga pembagian kategori seluruh *stakeholder* sudah cukup seimbang dalam pengembangan ekowisata hutan pinus Lampung Barat Provinsi Lampung.
3. Hubungan antar seluruh *stakeholder* masih belum optimal. Melalui ketiga indikator hubungan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama terlihat

hubungan yang masih minim antara *stakeholder* kunci yaitu KPH Tangkit Tebak dan *stakeholder* sekunder yaitu Dinas pariwisata sehingga masih diperlukannya peningkatan terhadap hubungan seluruh *stakeholder*.

## **5.2. Saran**

Pengelolaan ekowisata hutan pinus Lampung Barat Provinsi Lampung sudah cukup optimal melalui pembagian peran dan kategori *stakeholder*. Namun masih adanya kendala terhadap hubungan antar *stakeholder* baik komunikasi, koordinasi maupun kerjasama terutama antara *stakeholder* kunci dan *stakeholder* sekunder sehingga diperlukan peningkatan hubungan salah satunya dapat melalui intensitas pertemuan seluruh *stakeholder* seperti penambahan agenda rapat dalam setiap bulan dengan syarat harus dihadiri seluruh *stakeholder* terkait. Selain itu, apabila kedepannya ada penelitian dilokasi ekowisata hutan pinus terkait *stakeholder* disarankan mampu menggali informasi lebih dalam dengan mempertajam pertanyaan pada kuisioner untuk seluruh *stakeholder* primer, kunci, dan sekunder sehingga diharapkan informasi yang didapat lebih jelas menggambarkan keterkaitan seluruh *stakeholder* terhadap pengelolaan ekowisata hutan pinus Lampung Barat, Provinsi Lampung

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandy, B., dan Setiawan, A. 2016. Potensi wisata alam di Pematang Tanggang Desa Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(1): 41-50.
- Agus, F., Gintings, A. N. dan Noordwijk, M V. 2002. Pilihan Teknologi Agroforestri/Konservasi Tanah Untuk Areal Pertanian Berbasis Kopi di Sumberjaya, Lampung Barat. Buku. Word Agroforestry Centre. Bogor. 60p.
- Alfatianda, C. dan Djuwendah, E. 2017. Dampak ekowisata dan agrowisata (Eko-agrowisata) terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa Cibuntu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*. 4(3): 434-443.
- Alviya, I. dan Suryandari, E.Y. 2008. Kajian konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan model Way Terusan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 5(2): 101-120.
- Amalyah, Reski, Djamhur, H. dan Luchman, H. 2016. Peran stakeholder Pariwisata dalam pengembangan Pulau Samalona sebagai destinasi wisata bahari. *Jurnal Administrasi Bisnis*. 37(1):158-163.
- Amiruddin dan Zulkifli, A. 2020. Perencanaan pengembangan desa ekowisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal (Study Desa Tongke-Tongke). *Jurnal Ilmiah Administrasita*.11(01): 16-24.
- Berliandaldo M., Chodiq, A. dan Fryantoni, D. 2021. Kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder dalam pembangunan berkelanjutan sektor pariwisata di Kebun Raya Cibinong. INOBIS. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*. 4 (2):221-234.
- Boedirochminarni, A. dan Suliswanto, M. S. W. 2017. Analisis kepuasan pengunjung ekowisata Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 15(1): 105-116.
- Budiaji, W. 2013. Skala pengukuran dan jumlah respon skala likert. *Jurnal ilmu pertanian dan perikanan*.2(2): 127-133.

- Budiningsih K., Ekawati S., Gamin, Sylviani, Suryandari, E Y. dan Salaka, F. 2015. Tipologi dan strategi pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 12(3): 283-297.
- Cahyana, S. R. dan Saptono, N. 2019. Analisis peran *stakeholder* Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*. 7(2): 390-397.
- Damanik, J. dan Janianton. 2009. Isu-isu krusial dalam pengelolaan Desa Wisata Dewasa ini. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*. 5(3): 127-137.
- Dewi, I. N., Andayani, W. dan Suryanto, P. 2017. Pengembangan ekowisata kawasan hutan dengan skema Hutan Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 24(2): 95-102.
- Departemen Kehutanan 2006. *Buku Pintar Bidang Planologi Kehutanan*. Buku. Jakarta.
- Destiana, R., Kismartini dan Yuningsih, T. 2020. Analisis peran stakeholders dalam pengembangan destinasi pariwisata halal di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*. 8(2):132-153.
- Fandeli, C. 2002. *Perencanaan Kepariwisata Alam*. Buku. Penerbit Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 265p.
- Ginoga, K., Lugina, M. dan Djaenudin, D. 2005. Kajian kebijakan pengelolaan Hutan Lindung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi*. 2(2): 203-232.
- Gulo, W. 2007. *Metodologi Penelitian*. Buku. PT Grasindo. Jakarta. 262p.
- Groenendijk, L. 2003. *Planning and Management Tools*. Netherland (AN): The International Institute for Geo-Information Science and Earth. Book. Netherland. 154p.
- Hastari, B. dan Girsang, S.R.M. 2019. Partisipasi pelaku ekowisata dalam upaya konservasi di Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah. *Jurnal Daun*. 6(2):105-116.
- Hernawan, E., Basuni, S., Masy'ud, B., dan Kusri, M. D. 2018. Partisipasi stakeholder dalam konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Media Konservasi*. 23(3): 226-235.
- Hidayah, N. A., Hutagalung, S.S. dan Hermawan, D. 2019. Analisis peran stakeholder dalam pengembangan wisata talang air peninggalan kolonial Belanda di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Administrasi Publik*. 7(1): 55-71.

- Ichsan, A.C. 2018. Kinerja pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Belantara*. 1(01): 1-9.
- Indrasari, D., Wulandari, C., dan Bintoro, A. 2017. Pengembangan potensi hasil hutan bukan kayu oleh kelompok sadar hutan lestari Wana Agung di Register 22 Way Waya Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(1): 81-91.
- Kaskoyo, H., Mohammed, A. J., dan Inoue, M. 2017. Impact of community forest program in protection forest on livelihood outcomes: a case study of Lampung Province, Indonesia. *Journal of Sustainable Forestry*. 36(3): 250-263.
- Kartodihardjo, H., Nugroho, B., dan Putro, H.R. 2011. *Forest management unit development-concept, legislation and implementation*. Directorate of area management and preparation of forest area Utilisation, Directorate General of Forestry Planning, Ministry of Forestry. 113p.
- Kementrian Dalam Negeri. 2009. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.
- Kementrian Kehutanan. 2009. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- Kementrian Kehutanan. 2012. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung.
- KPH Tangkit Tebak. 2018. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Tangkit Tebak*. Buku. Lampung. KPH Tangkit Tebak. 61p.
- Kurniasari, E., Rustiadi, E. dan Tonny, F. 2013. Strategi pengembangan ekowisata melalui peningkatan partisipasi masyarakat, studi kasus komunitas Kelurahan Kalimulya Kota Depok. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*. 5(2). 37-47.
- Laksemi, N. P. S. T., dan Sulistyawati, E. 2019. Perhutanan sosial berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi kasus di Hutan Desa Wanagiri) (Sustainable Social Forestry in Bali. *Jurnal Sylva Lestari*. 7(2): 150-163.
- Larasati, A. P., Wulandari, C., Febryano, I. G. dan Kaskoyo, H. 2021. Peran kelembagaan kelompok tani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. *Jurnal Belantara*. 4(1): 39-47.

- Latupapua, Y.T. 2015. Implementasi peran stakeholder dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional Manusea (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Agroforestri*. 10(1):21-30.
- Manullang, S. 2018. *Teori dan praktek analisis stakeholder*. Buku. Bogor. IPB Press. 218p.
- Mare, R ., Idris, M., dan Sjarlis, S. 2020. Pengaruh kompetensi, koordinasi dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada sekretariat Kabupaten Baru. *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Kewirausahaan*. 2(1): 34-48.
- Maryudi, A. 2016. Arahan tata hubungan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 10(1): 57-64.
- Maryono, E., Kuswanto, S., Getteng, M., Ahmad, T., & Mulyasari, S. 2005. *Pelibatan Publik dalam Pengambilan Keputusan (Public Involvement in Decision Making)*. Jakarta: LP3ES.
- Muhammad, A. 2011. *Komunikasi Organisasi*.Buku. Jakarta : PT. Bumi Aksara. 228p.
- Muttaqin, M. Z., Ardiyanto, A. dan Wahyudi, E. 2017. Optimalisasi program pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Politico*. 17(2): 238-255.
- Nandini, R. 2013. Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) pada hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Lombok. *Jurnal penelitian hutan tanaman*. 10(1): 43-55.
- Nurkhalis, A. H. dan Sunarminto, T. 2018. Analisis stakeholders dalam pengembangan ekowisata di Hutan Adat Ammatoa Kajang Sulawesi Selatan. *Jurnal Pariwisata*. 5(2): 107-119.
- Nugroho, H. C., Zauhar, S. dan Suryadi. 2014. Koordinasi pelaksana program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal PAL*. 5(1):12-22.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Perundangan Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- Pulungan, M.S. 2013. Optimalisasi pengembangan potensi ekowisata sebagai objek wisata andalan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim. *Jurnal Bina Praja. Journal of Home Affairs Governance*. 5(3): 205-214.

- Putri Amanda, P.A.V. 2020. Analisis pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan cagar budaya sebagai destinasi wisata Kota Pontianak. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*. 8(3):202-213.
- Puspita, N.T., Qurniati, R. dan Febryano, I. G. 2020. Modal sosial masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegei. *Jurnal Sylva Lestari*. 8(01): 54-64.
- Reed, M., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, CH. and Stringer, L. C. 2009. Who's and why? Atypology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*. 90(09):1933-1949.
- Riniarti, M., dan Setiawan, A. 2014. Status kesuburan tanah pada dua tutupan lahan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Batutegei Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 2(2): 99-104.
- Rizal, A., Dewi, I.N. dan Kusumedi, P. 2011. Kajian strategi implementasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi kasus di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 8(2): 167-188.
- Rosalia, F. dan Ratnasari, Y. 2016. Analisis pengelolaan hutan kemasyarakatan di sekitar kawasan Hutan Lindung Register 30 Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tahun 2010. *Jurnal Sosio Humaniora*. 18(1): 32-36.
- Rosalinda, E., Darusman, D., Suharjito, D., Nurrochmat, D. R. 2012. Analisis pemangku kepentingan dalam pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. *JMHT*. 53(2): 78-85.
- Ruhimat, I.S. 2010. Implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 7(3):169 - 178.
- RUPES (Rewards For Use Of And Shared Investment In Pro-Poor Environmental Service). 2009. *Gagasan kebijakan konsep jasa lingkungan dan pembayaran jasa lingkungan di Indonesia*. RUPES World Agroforestry Center ICRAF Southeast Asia Regional Office. 3p.
- Safe'i, R., Wulandari, C. dan Kaskoyo H. 2019. Penilaian kesehatan hutan pada berbagai tipe hutan di Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 7(1): 95-109.
- Safira, G. C., Wulandari, C., dan Kaskoyo, H. 2017. Kajian pengetahuan ekologi lokal dalam konservasi tanah dan air di sekitar Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(2): 23-29.

- Sanudin., Awang, S.A. Sadono, R., dan Purwanto, R.H. 2016. Perkembangan hutan kemasyarakatan di Provinsi Lampung. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 23(2): 276-283.
- Sanjaya, R., Wulandari, C., dan Herwanti, S. 2017. Evaluasi pengelolaan hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(2): 30-42.
- Saputra, F. 2018. Peran Stakeholder dalam Implementasi Fungsi Konservasi di Taman Hutan Raya Ir H Djuanda. *Skripsi*.
- Sari, L. E. 2018. Peran Stakeholder dalam menjaga kebersihan objek wisata pantai tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal JOM FISIP*. 5(2):1-16.
- Setyawan, D., dan Sundari, F. 2020. Marketing digital wisata pinus ecopark dalam etika bisnis islam di Lampung Barat. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*. 5(1): 21-51.
- Setiawan, R., Febryano, I. G., dan Bintoro, A. 2018. Partisipasi masyarakat pada pengembangan agroforestri dalam program kemitraan di KPH Unit XIV Gedong Wani (Participation of Community in Development of Agroforestry in the Partnership Program in Gedong Wani Forest Management Unit). *Jurnal Sylva Lestari*. 6(3): 56-63.
- Simanjorang, F., Hakim, L. dan Sunarti. 2020. Peran stakeholder dalam pembangunan pariwisata di Pulau Samosir. *Jurnal Profit*. 14(2): 42-52.
- Siregar, M. 2011. *Peranan stakeholders terhadap pengembangan ekowisata di Taman Nasional Teluk Cenderawasih Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. 115p.
- Siswanto, A. dan Moeljadi, M. 2015. Eco-tourism development strategy Baluran National Park in the Regency of Situbondo, East Java, Indonesia. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*. 4(4): 185-195.
- Soeharto, B., Kusmana, C., Darusman, D., dan Suharjito, D. 2012. Perubahan penggunaan lahan dan kelestarian produksi PLTA Way Besai di Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*. 9(1): 25-34.
- Soenarno, S. M. 2015. Pembelajaran materi jasa lingkungan formatif. *Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*. 4(2): 151-156.

- Sufi, W. dan Nurpeni, F. M. S. 2018. Pengembangan kawasan ekowisata di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. *Jurnal Niara*. 10(2): 78-86.
- Sulistya, E.S., Salaka., Fentie, J. dan Budiningsih, K. 2010. Analisis kesiapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta sebagai badan layanan umum daerah. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 15:(1):1-18.
- Sulistyawati, A. S. (2011). Pengembangan ekowisata berbasis kerakyatan di Banjar Nyuh Kuning, Desa Mas, Ubud Ekotropik. *Jurnal Ilmu Lingkungan (JournalofEnvironmentalScience)*.6(2): 128-132.
- Sundari F. 2020. Strategi Promosi Pengembangan Wisata Pinus Ecopark Melalui Media Sosial Dalam Persepektif Etika Bisnis Islam (Study pada Wisata Pinus Ecopark di Lampung Barat. *Skripsi*. Metro.
- Suporaharjo. 2005. *Manajemen kolaborasi memahami pluralisme membangun konsensus*. Buku.Bogor. Pustaka Latin. 480p.
- Supratman. 2019. Desain model pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kabupaten Mamuju Pprovinsi Sulawesi. *Jurnal Perennial*. 5(1): 36-44.
- Susilawati, S. 2016. Pengembangan ekowisata sebagai salah satu upaya pemberdayaan sosial budaya dan ekonomi di masyarakat. *Jurnal Geografi Gea*. 8(1): 43-50.
- The International ecotourismsociety. 2016. *Ecotourism outlook 2015*. Travel and Tourism ResearchAssociation, Washington DC. Paper.10p.
- Vianti, R., Abdullah, A. dan Rusdi, M. 2019. Daya dukung masyarakat terhadap pengembangan ekowisata kawasan Tahura Pocut Meurah Intan Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi dan Kependidikan*.6(2): 97-100.
- West, M. 2002. *Kerjasama Yang Efektif*.Jakarta: Kanisius. 199p.
- Widodo, M. L., Soekmadi, R. dan Arifin, H. S. 2018. Analisis stakeholders dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu. *Journalof Natural Resources andEnvironmentalManagement*. 8(1): 55-61.
- Widowati, S. dan Nadra, N.M. 2013. Evaluasi penerapan prinsip - prinsip dan kriteria ekowisata di Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*. 3(3): 312-321.
- Winarni, S., Yuwono, S. B., danHerwanti, S. 2016. Struktur pendapatan, tingkat kesejahteraan dan faktor produksi agroforestri kopi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung Batutegi. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(1): 1-10.

- Wulandari, C. 2019. Modal sosial masyarakat dalam mendukung pengembangan ekowisata di Hutan Lindung. *Jurnal Hutan Tropis*.7(3): 233-239.
- Yudischa, R., Wulandari, C., dan Hilmanto, R. 2014. Dampak partisipasi wanita dan faktor demografi dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) terhadap pendapatan keluarga di Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Sylva Lestari*.2(3): 59-72.
- Yeny, I. 2014. Para pihak dan perannya dalam pembangunan KPH model di Tanah Papua. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 11(3): 193-206.
- Zahara, E. 2018. Peranan komunikasi organisasi bagi pimpinan organisasi. *JurnalWarta Dharmawangsa*. 1(56): 1829:7463.